

ANALISIS STRATEGI BANK INDONESIA MEMPERTAHANKAN BI-RATE DI TENGAH DEPRESIASI RUPIAH KUARTAL I/2026

Oleh

Nayla Al Afifah¹, Aldila Krisnaresanti², Dian Isnawati³

^{1,2,3}Universitas Jenderal Soedirman

Email: ¹nayla.afifah@mhs.unsoed.ac.id, ²aldila.krisnaresanti@unsoed.ac.id,

³dian.isnawati@unsoed.ac.id

Article History:

Received: 18-06-2026

Revised: 01-07-2026

Accepted: 21-07-2026

Keywords:

Bank Indonesia;
Monetary Policy; BI-
Rate; Rupiah Exchange
Rate; Monetary Policy
Mix; SRBI; Foreign
Exchange Market
Intervention.

Abstract: *Entering the first quarter of 2026 (Q1/2026), the Indonesian economy was faced with escalating global uncertainty, triggering significant depreciation pressure on the Rupiah exchange rate. In confronting this external shock, Bank Indonesia (BI) was presented with a crucial macroeconomic dilemma between raising the benchmark interest rate to curb capital outflow or maintaining it to preserve the recovery momentum of the domestic real sector. We aim to dissect Bank Indonesia's strategy and policy foundation in maintaining the BI-Rate amidst the weakening trend of the Rupiah throughout Q1/2026. Specifically, this paper evaluates the effectiveness of non-interest rate policy mix—such as the optimization of Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI) and dual intervention in the foreign exchange market—as substitute instruments for monetary tightening. This study employs a qualitative descriptive-analytical approach with an evaluative case study method. The data utilized consists of secondary, real-time data from Q1/2026 obtained from the official reports of Bank Indonesia's Board of Governors' Meeting (RDG). The policy analysis is conducted through a chronological comparative method, utilizing empirical baselines from the first quarter of 2020–2024 monetary transitions and the 2025 policy responses*

PENDAHULUAN

Memasuki awal tahun 2026, perekonomian domestik kembali dihadapkan pada guncangan eksternal yang hebat seiring dengan pecahnya perang di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026. Konflik geopolitik ini memicu lonjakan harga minyak dunia, mendisrupsi rantai pasok global, dan mendorong terjadinya sentimen menghindari risiko (*flight to safety*). Akibatnya, investor global berbondong-bondong memindahkan modal mereka ke aset aman (*safe-haven assets*) di Amerika Serikat, yang memicu penguatan indeks dolar AS (DXY) secara masif dan menekan mata uang negara-negara berkembang (*emerging markets*), termasuk Indonesia.

Dampak dari memburuknya pasar keuangan global ini terlihat nyata pada rapor pergerakan nilai tukar domestik sepanjang Kuartal I/2026. Berdasarkan laporan Tinjauan

Kebijakan Moneter Februari 2026, kurs rupiah pada pertengahan Februari tercatat melemah ke level Rp16.880 per dolar AS akibat tingginya ketidakpastian global dan kenaikan permintaan valas korporasi. Tekanan ini terus meningkat hingga Maret 2026, di mana investasi portofolio mencatat aliran modal keluar bersih (net outflows) sebesar 1,1 miliar dolar AS. Berdasarkan data Tinjauan Kebijakan Moneter Maret 2026, kondisi ini memaksa nilai tukar rupiah merosot lebih dalam hingga menyentuh angka Rp16.985 per dolar AS per 16 Maret 2026, sebelum akhirnya bertengger di level Rp17.140 per dolar AS pada bulan April sebagaimana dipaparkan dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2026.

Meskipun volatilitas nilai tukar begitu tinggi, Bank Indonesia (BI) mengambil keputusan taktis yang menarik dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) sepanjang triwulan pertama tahun 2026 dengan tetap mempertahankan suku bunga acuan (*BI-Rate*) pada level 4,75%. Langkah menahan suku bunga di tengah depresiasi mata uang ini menciptakan sebuah dilema makroekonomi yang krusial. Di satu sisi, BI harus menjaga stabilitas nilai tukar, namun di sisi lain, bank sentral berkomitmen untuk memanfaatkan likuiditas yang longgar untuk menjaga momentum pertumbuhan kredit (yang tumbuh 9,49% yoy pada bulan Maret) demi menopang sektor riil domestik pascapandemi. Guna menyiasati penahanan *BI-Rate*, Bank Indonesia mengalihkan kekuatan pertahanan moneter melalui optimalisasi instrumen *pro-market*, seperti penyerapan likuiditas lewat Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) serta pengetatan batas (*threshold*) transaksi valas harian.

LANDASAN TEORI

Suku bunga merupakan instrumen inti dalam kebijakan moneter yang diadopsi oleh bank sentral untuk mengendalikan stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat, dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) menetapkan suku bunga acuan—yang dikenal sebagai *BI-Rate*—sebagai jangkar sekaligus indikator utama dalam mengarahkan kebijakan moneter. *BI Rate* atau dikenal sebagai *BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7DRR)*, secara sederhana diartikan sebagai suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). Suku bunga ini digunakan oleh institusi keuangan di seluruh Indonesia sebagai dasar dalam menentukan suku bunga produk keuangan seperti pinjaman dan tabungan (Auf, 2025). Formulasi dan keputusan penyesuaian tingkat suku bunga ini tidak diambil secara parsial, melainkan dipengaruhi secara kompleks oleh berbagai indikator makroekonomi, mulai dari laju inflasi domestik, dinamika pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), fluktuasi nilai tukar, hingga ekspektasi pasar global. Suku bunga memberikan sinyal searah terhadap nilai tukar. Jika suku bunga mengalami penurunan, pergerakan nilai tukar cenderung menurun (depresiasi). Sebaliknya, bila suku bunga meningkat, hal tersebut akan memicu peningkatan nilai tukar rupiah (apresiasi).

Menurut Latifah dkk. (2022), nilai tukar adalah nilai dari satu mata uang rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain. Sebagai salah satu pilar stabilitas ekonomi makro, fluktuasi nilai tukar rupiah memiliki dampak sistemik terhadap sektor perdagangan internasional, arus investasi asing, dan inflasi nasional. Pergeseran nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) memegang urgensi tinggi mengingat dominasi dolar sebagai mata uang global dan posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi berkembang (*emerging market*) yang strategis. Secara mekanisme pasar, tingkat suku bunga domestik berfungsi sebagai daya tarik bagi modal asing (*capital inflow*); tingkat suku bunga yang

kompetitif cenderung menarik investor portofolio untuk menempatkan dana di instrumen keuangan Indonesia demi imbal hasil yang lebih tinggi. Konsekuensinya, peningkatan permintaan terhadap rupiah ini akan mendorong apresiasi (penguatan) nilai tukar terhadap dolar AS, sementara penurunan suku bunga berisiko memicu capital outflow yang menekan depresiasi rupiah.

Dinamika perubahan nilai rupiah terhadap dolar AS membawa konsekuensi riil yang signifikan bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Melemahnya nilai tukar rupiah secara drastis dapat memicu peningkatan biaya barang modal dan bahan baku impor (imported inflation), yang pada gilirannya menggerus daya beli masyarakat dan meningkatkan beban operasional industri nasional. Di sisi lain, volatilitas nilai tukar yang ekstrem juga mengganggu kepastian iklim usaha, menurunkan daya saing relatif komoditas ekspor akibat ketidakpastian harga bagi mitra dagang internasional, serta menciptakan sentimen negatif yang membuat investor asing cenderung bersikap wait-and-see dalam menanamkan modal langsung (Foreign Direct Investment).

Menyikapi risiko volatilitas tersebut, Bank Indonesia memegang peran krusial sebagai otoritas moneter tertinggi yang memiliki mandat penuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Strategi yang diterapkan mencakup jalur regulasi struktural, seperti kewajiban penggunaan mata uang rupiah dalam seluruh transaksi di wilayah NKRI dan pasar uang domestik guna menekan ketergantungan terhadap mata uang asing. Selain itu, BI juga menempuh langkah taktis berupa intervensi langsung di pasar valuta asing dan pasar domestik guna menjangkar pergerakan rupiah agar sejalan dengan fundamental ekonominya. Kenaikan atau bertahannya suku bunga domestik pada tingkat yang kompetitif akan meningkatkan daya tarik aset-aset keuangan dalam negeri di mata investor asing (portfolio framework), memicu aliran modal masuk (capital inflows), dan pada akhirnya mengapresiasi atau menstabilkan nilai tukar mata uang terhadap dolar AS.

METODE PENELITIAN

Berangkat dari fenomena dilema moneter tersebut, penelitian dalam paper ini bertujuan untuk membedah secara mendalam runtutan strategi, bauran kebijakan (*policy mix*), serta landasan fundamental Bank Indonesia dalam mempertahankan tingkat *BI-Rate* di level 4,75% di tengah tren pelemahan nilai tukar Rupiah yang menembus psikologis Rp17.000 selama Kuartal I/2026. Guna menjawab pokok permasalahan tersebut, penelitian dalam paper ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi evaluatif dan komparatif. Penggunaan metode ini dipilih karena fokus utama penelitian bukan untuk menguji hipotesis statistik atau variabel angka mentah, melainkan untuk mengevaluasi efektivitas, rasionalitas, serta dilema di balik keputusan riil sebuah lembaga otoritas dalam mempertahankan kebijakan moneter. Data yang digunakan dalam studi ini merupakan data sekunder periode seketika (real-time data) sepanjang Kuartal I/2026 yang bersumber dari rilis Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2026 Bank Indonesia.. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan taktik operasi moneter kuartal tersebut terhadap tren historis kebijakan moneter Bank Indonesia pada periode transisi dan normalisasi tahun 2022–2025. Melalui pendekatan komparatif ini, paper ini diharapkan dapat memetakan apakah respons bank sentral di awal tahun 2026 merupakan sebuah bentuk pergeseran struktural yang adaptif atau konsistensi pola dari mitigasi syok makroekonomi masa lalu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Kebijakan Moneter Kuartal satu Februari

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 5,50%. Fokus kebijakan saat ini pada upaya penguatan dan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (Bank Indonesia, 2026). Nilai tukar rupiah pada 18 Februari 2026 tercatat sebesar Rp16.880 per dolar AS, melemah 0,56% (ptp) dibandingkan dengan level akhir Januari 2026. Pelemahan nilai tukar tersebut terutama dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah meningkatnya permintaan valas korporasi domestik sejalan dengan kenaikan kegiatan ekonomi.

Strategi utama dari Bank Indonesia (BI) diterapkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang posisinya saat ini sudah undervalued dan memperkuat ekonomi domestik. Dimulai dengan melakukan intervensi langsung, baik di pasar domestik melalui transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun di pasar luar negeri melalui Non-Deliverable Forward (NDF), melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur dan transparan untuk mengelola likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan, serta mengelola struktur suku bunga dan volume instrumen moneter (seperti SRBI) guna menarik aliran modal asing (investasi portofolio) masuk ke dalam negeri. Pihak pemerintah menggelontorkan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga domestik tetap kuat di tengah kelesuan global. Dengan dukungan Program Asta Cita, dipererat koordinasi dengan KSSK untuk mendorong pembiayaan perbankan ke program-program strategis pemerintah.

Maret

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 Maret 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 5,50%. Keputusan ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah serta menjaga pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ (Bank Indonesia, 2026). Perang Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global. Melonjaknya harga minyak dunia mengganggu rantai pasok global, menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan inflasi. Kondisi ini memperburuk pasar keuangan global yang ditandai dengan menguatnya dolar AS (DXY), meningkatnya yield US Treasury akibat pembengkaknya defisit fiskal perang, serta tertundanya penurunan suku bunga acuan (Fed Funds Rate). Alhasil, terjadi pergeseran modal besar-besaran (*flight to safety*) ke aset aman (*safe-haven assets*) di pasar uang AS, yang menyebabkan arus modal keluar dari negara berkembang (*emerging markets*). Tekanan berat pada mata uang dan pengelolaan ekonomi negara berkembang ini menuntut adanya penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter domestik demi menjaga stabilitas eksternal sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Nilai tukar rupiah pada 16 Maret 2026 tercatat sebesar Rp16.985 per dolar AS, melemah 1,29% (ptp) dibandingkan dengan level akhir Februari 2026, sejalan dengan

pelemahan mata uang negara non-USD. Guna tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah konflik global, Bank Indonesia terus meningkatkan intensitas intervensi baik di pasar NDF luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga mengoptimalkan seluruh instrumen moneter untuk meningkatkan aliran masuk modal asing guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia menerapkan strategi kebijakan moneter seperti intervensi pasar Multi-Jalur dengan meningkatkan intensitas intervensi secara terukur di berbagai pasar, baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri (off-shore), maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. Kemudian, BI akan menerapkan strategi Operasi Moneter Pro-Market dengan mengoptimalkan seluruh instrumen moneter (termasuk pengelolaan struktur suku bunga, volume instrumen moneter, dan transaksi SBN di pasar sekunder) untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan memastikan kecukupan likuiditas. Penyesuaian Batas (Threshold) Transaksi Valas (Efektif April 2026) untuk menurunkan threshold tunai beli valas terhadap rupiah dari USD 100 ribu menjadi USD 50 ribu per pelaku per bulan, meningkatkan threshold jual DNDF/Forward dari USD 5 juta menjadi USD 10 juta per transaksi, dan meningkatkan threshold beli dan jual Swap dari USD 5 juta menjadi USD 10 juta per transaksi. Untuk ketentuan Pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD), BI akan menurunkan threshold kewajiban dokumen pendukung untuk transfer dana keluar negeri (outgoing) dalam valas dari USD 100 ribu menjadi USD 50 ribu mulai April 2026 demi memperkuat pemantauan arus modal.

Analisis Komparasi Historis, dari tahun 2022-2025 kuartal 1

Selama rentang waktu 2020 hingga 2024, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat mengalami perubahan yang cukup signifikan dan tidak stabil karena tekanan yang sangat besar akibat dampak pandemi COVID-19, yang memicu kepanikan di pasar keuangan global dan menyebabkan nilai tukar Rupiah melemah tajam hingga menembus angka Rp 16.000 per dolar AS. Situasi ini mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang tertekan serta tingginya ketidakpastian di pasar global.

Kondisi mulai menunjukkan perbaikan pada tahun 2021 hingga 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan membaiknya harga komoditas internasional (Auf, 2025). Stabilitas nilai tukar semakin didukung oleh arus modal masuk dan koordinasi kebijakan fiskal-moneter yang lebih konsisten. Meski demikian, bayang-bayang kebijakan moneter global yang ketat, terutama dari Amerika Serikat, tetap menjadi faktor eksternal yang menimbulkan volatilitas dan tekanan terhadap rupiah.

Memasuki tahun 2023 hingga 2024, ketidakpastian global kembali meningkat, terutama akibat penguatan dolar AS dan dinamika geopolitik yang memengaruhi pasar keuangan dunia. Rupiah kembali terdepresiasi hingga melampaui level Rp 16.000, mendorong Bank Indonesia untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing serta mempertahankan kebijakan suku bunga yang berhati-hati. Di tengah arus modal yang fluktuatif dan sentimen pasar yang sensitif, kekuatan fundamental ekonomi domestik dan respons cepat dari kebijakan moneter menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta menghindari tekanan yang lebih dalam terhadap rupiah.

Secara umum, untuk tahun 2025, bauran kebijakan moneter Bank Indonesia memadukan strategi jangka pendek—melalui intervensi pasar dan manajemen likuiditas—dengan penguatan struktural jangka menengah seperti Kebijakan Insentif Likuiditas

Makroprudensial (KLM). Langkah yang responsif dan terukur ini krusial dalam memitigasi guncangan eksternal, termasuk tren kenaikan suku bunga global serta eskalasi ketegangan geopolitik. Respons yang cepat dan terukur menjadi kunci dalam menghadapi gejala eksternal yang tak dapat dikendalikan sepenuhnya, seperti kenaikan suku bunga global dan tensi geopolitik dunia (Salma, 2026). Kendati demikian, kebijakan moneter tidak dapat bekerja secara parsial. Sinergi yang kuat dengan kebijakan fiskal mutlak diperlukan agar bauran kebijakan yang dihasilkan mampu saling mengoptimalkan dampak, alih-alih saling menegasikan. Harmonisasi kedua kebijakan ini akan dikaji lebih mendalam pada subbab berikutnya.

TAHUN	Nilai Tukar
2022m1	14381
2022m2	14371
2022m3	14349
2023m1	14979
2023m2	15062
2023m3	14751
2024m1	15796
2024m2	15673
2024m3	15853
2025m1	16275
2025m2	16332
2025m3	16465
2026m1	16748
2026m2	16880
2026m3	16985

Pada periode Februari–Maret 2022, Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan (BI7DRR) di level terendah historis 3,50% (Deposit Facility 2,75%, Lending Facility 4,25%) demi menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh varian Omicron, percepatan normalisasi moneter di AS dan Eropa, serta eskalasi perang Rusia-Ukraina pada Maret 2022. Meskipun perang tersebut memicu sanksi internasional, gangguan rantai pasok, dan lonjakan harga komoditas (energi dan pangan), perekonomian domestik tetap kuat setelah tumbuh 3,69% pada tahun 2021, dengan proyeksi tahun 2022 di kisaran 4,7%–5,5%. Inflasi IHK pun terjaga rendah (Januari 2,18% yoy dan Februari deflasi mtm 0,02% atau 2,06% yoy). Di sisi likuiditas, BI melakukan pengetatan halus (soft tightening) melalui kenaikan GWM Rupiah tahap I mulai 1 Maret 2022 yang menyerap Rp55 triliun secara netto tanpa mengganggu penyaluran kredit yang tumbuh 6,33% yoy (kredit UMKM tumbuh 14,32% yoy) didukung CAR bank 25,78%. Sementara itu, transaksi digital tumbuh melejit dengan nilai uang elektronik naik 41,35% hingga 66,65% yoy dan digital banking naik 46,53% yoy, yang direspons BI dengan menaikkan limit transaksi QRIS menjadi Rp10 juta per transaksi mulai 1 Maret 2022.

Memasuki periode awal hingga Maret 2023, setelah agresif menaikkan suku bunga total 225 bps sejak 2022, BI memilih untuk mempertahankan BI7DRR di level 5,75% (Deposit

Facility 5,00%, Lending Facility 6,50%) guna memastikan inflasi inti tetap di target $3,0 \pm 1\%$. Langkah pengetatan ini diambil di tengah fundamental domestik tahun 2022 yang solid, tumbuh 5,3% YoY, serta risiko resesi Indonesia yang sangat rendah (hanya 5% menurut survei Bloomberg). Inflasi IHK Januari tercatat 5,28% yoy dan bergerak ke 5,47% yoy di Februari karena harga pangan, namun inflasi inti mendingin ke 3,09% yoy. Ketahanan eksternal juga prima, didukung surplus neraca perdagangan Januari sebesar USD 3,87 miliar (surplus 33 bulan berturut-turut). Meskipun pasar keuangan global sempat diguncang sentimen penutupan tiga bank besar di AS pada Maret 2023, nilai tukar rupiah tetap terkendali dan menguat 1,32% ytd berkat intervensi BI, ditopang sektor perbankan yang kokoh dengan CAR 25,88% serta pertumbuhan kredit yang melesat 10,64% yoy.

Pada periode Februari–Maret 2024, BI konsisten mempertahankan BI-Rate di level 6,00% (Deposit Facility 5,25%, Lending Facility 6,75%) demi menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari ketidakpastian pasar keuangan global akibat inflasi AS dan ketegangan geopolitik, meskipun pertumbuhan dunia pada Februari relatif baik di angka 3,0% didorong oleh AS dan India. Di dalam negeri, pasca-Pemilu ekonomi diproyeksikan tumbuh kuat di kisaran 4,7%–5,5%. Inflasi IHK Januari terpantau rendah 2,57% yoy, namun memasuki Maret 2024, aktivitas ekonomi meningkat tajam akibat konsumsi Ramadan dan persiapan Idulfitri 1445 H. Hal ini mendorong inflasi IHK merangkak naik ke level 3,05% yoy, dipicu oleh lonjakan kelompok pangan (volatile food) yang menyentuh angka 10,33% yoy akibat faktor musiman hari besar keagamaan dan sisa dampak El Niño pada pasokan beras nasional.

Terakhir, pada periode Februari–Maret 2025, BI kembali menetapkan kebijakan untuk mempertahankan BI-Rate di level 5,75% (Deposit Facility 5,00%, Lending Facility 6,50%) untuk mengendalikan ekspektasi inflasi dan menjaga stabilitas moneter. Dari sisi global, terjadi divergensi ekonomi di mana AS tetap kuat disokong oleh konsumsi rumah tangga, sedangkan Eropa, Tiongkok, dan Jepang melemah akibat lesunya permintaan serta dampak kenaikan tarif impor oleh AS. Pada Maret 2025, kebijakan tarif ini mulai memperlambat ekonomi AS sendiri, sehingga aliran modal global yang semula menumpuk di AS mulai bergeser ke aset aman (safe haven) seperti komoditas emas dan obligasi negara berkembang (Emerging Markets), dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang diproyeksikan stabil di angka 3,2%. Di dalam negeri, tren pertumbuhan tetap terjaga, melanjutkan capaian tahun 2024 yang tumbuh 5,03%, ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi nonbangunan. Inflasi IHK Januari 2025 menurun ke angka 0,76% yoy berkat diskon tarif listrik dan pada Februari 2025 mencatat deflasi 0,09% yoy. Memasuki Maret 2025, momentum ekonomi kian menguat menjelang Idulfitri 1446 H dan pencairan THR, yang didukung aktivitas manufaktur (PMI BI) yang tetap ekspansif, sehingga BI memprakirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 akan berada di kisaran 4,7%–5,5% dengan inflasi aman terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$.

KESIMPULAN

Berdasarkan data Laporan Kebijakan Moneter Kuartal I/2026 yang sudah dipaparkan, keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan BI-Rate di level 4,75% sepanjang Q1/2026 (Februari, Maret, dan April) dinilai sebagai langkah yang konsisten, terukur, dan strategis dalam menghadapi ketidakpastian global. Secara objektif, kebijakan mempertahankan suku bunga tersebut dinilai berdasarkan beberapa fokus utama sepertiantisipasi gejolak geopolitik dan tren global, strategi stabilisasi nilai tukar rupiah,

pengendalian inflasi dan dukungan pertumbuhan domestik, serta sinergi kebijakan moneter dan makroprudensial.

Strategi untuk mempertahankan BI-Rate pada Q1/2026 dinilai sebagai jangkar stabilitas yang realistis. BI memilih tidak menaikkan suku bunga secara agresif demi menjaga momentum pemulihan ekonomi domestik, melainkan mengompensasi tekanan eksternal tersebut melalui intervensi valas yang intensif dan pengetatan aturan ambang batas (threshold) transaksi valas. Hasil dari komparasi kebijakan Strategi BI pada Q1/2026 merupakan sebuah bukti konsistensi pola bauran kebijakan (policy mix) yang telah ditekankan sejak era pasca-pandemi (2022–2025). BI tetap setia pada mandat ganda (dual mandate) untuk menjaga stabilitas eksternal (nilai tukar) sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi domestik melalui pendekatan multijalur, dengan menahan suku bunga acuan selama mungkin untuk menopang pertumbuhan domestik, sementara stabilitas nilai tukar rupiah diamankan menggunakan amunisi non-suku bunga (intervensi valas dan pengelolaan threshold transaksi).

Jika tekanan eksternal akibat konflik Timur Tengah, penguatan dolar AS (DXY), dan lonjakan yield US Treasury terus bertahan atau bahkan memburuk di Q2/2026, BI tidak bisa lagi hanya mengandalkan intervensi pasar. Jika cadangan devisa (cadev) mulai terkuras secara signifikan, berikut adalah langkah-langkah strategis yang harus dipertimbangkan:

- Melakukan pengetatan moneter secara gradual melalui kenaikan BI-Rate sebesar 25 bps sebagai tindakan *pre-emptive* untuk menjaga daya tarik investasi portofolio.
- Memperketat pengawasan terhadap batas transaksi valas (*threshold*) baru guna menekan laju *capital outflow* spekulatif.
- Mengakselerasi penyerapan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sektor komoditas untuk memperkuat struktur pasokan valas domestik.
- Memperkuat sinergisitas moneter-fiskal di bawah KSSK untuk memitigasi risiko *imported inflation* terhadap sektor riil nasional.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan paper ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam, yang syafaatnya kita nantikan di yaumul kiamat kelak.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Ibu dosen atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan paper ini. Tanpa bantuan beliau, paper ini tidak akan mungkin terselesaikan dengan baik.

Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta. Meskipun jarak memisahkan, kasih sayang dan perhatian yang senantiasa diberikan menjadi motivasi terbesar bagi penulis di setiap detik penyusunan paper ini.

Terima kasih juga penulis tujukan kepada diri sendiri, yang telah berjuang dan bertahan menghadapi segala rintangan hingga paper ini berhasil diselesaikan.

Sebagai penulis, saya berharap semoga paper ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam karya ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

DAFTAR REFERENSI

- Auf, Muhammad Abdurrahman. *Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, BI Rate, Jumlah Uang Beredar, Nilai Ekspor Dan Nilai Impor Terhadap Nilai Tukar Rupiah Di Indonesia Tahun 2020-2024*. Jakarta, Indonesia : Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI. *Laporan Ekonomi & Keuangan: Perekonomian Indonesia 2022 Tumbuh Solid (Februari 2023)*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, 2023.
- Bank Indonesia. *Tinjauan Kebijakan Moneter Februari 2025*. Jakarta: Tinjauan Kebijakan Moneter Desember 2024, 2025.
- Bank Indonesia. *Tinjauan Kebijakan Moneter Februari 2022*. Jakarta: Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia, 2022.
- Bank Indonesia. *Tinjauan Kebijakan Moneter Februari 2024*. Jakarta: Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, 2024.
- Bank Indonesia. *Tinjauan Kebijakan Moneter Maret 2022*. Jakarta: Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, 2022.
- Bank Indonesia. *Tinjauan Kebijakan Moneter Maret 2023*. Jakarta: Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, 2023.
- Bank Indonesia. *Tinjauan Kebijakan Moneter Maret 2024*. Jakarta: Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, 2024.
- Bank Indonesia. *Tinjauan Kebijakan Moneter Maret 2025*. Jakarta: Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, 2025.
- Chan Darakhsha, Faaz Enver, Haider Abdad, Khaleed Jalal. "Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Kurs Rupiah/Dolar Amerika Serikat." *PPIMAN : Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 2023: 44-53.
- Mutia Rafa Nursawitri, Nadia Sulistyaningsih, Miranda Herdia Nova, Miftahul Jannah, Khanaya Isyabrina Maryam, Gregorius Agung Steven Simanjuntak, Ahmad Setiawan Nuraya. "Analisis Edukatif Kebijakan Suku Bunga Bank Indonesia Berdasarkan Taylor Rule (2022-2023)." *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2025: 2943-2951.
- Putri Zunarti, Muhammad Syafri. "Analisis Kebijakan Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Menggunakan Pendekatan IS LM." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2026 : 74-89 .
- Salma, Saskia Nailatus. "Dampak Pelemahan Rupiah Terhadap Stabilitas Perbankan dan Perekonomian Indonesia (Studi Kasus : Analisis Kebijakan Moneter dan Fiskal Tahun 2025)." *Dampak Pelemahan Rupiah Terhadap Stabilitas Perbankan dan Perekonomian Indonesia (Studi Kasus : Analisis Kebijakan Moneter dan Fiskal Tahun 2025)*, 2026: 9-17.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN